

## Analisis Akuntansi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran Dan Kesesuaian Panyajian Laporan Terhadap PSAP 02 Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Medan

**Nurul Aini Siregar**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: [nurulsrg19@gmail.com](mailto:nurulsrg19@gmail.com)

**Saparuddin Siregar**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: [saparuddin@uinsu.ac.id](mailto:saparuddin@uinsu.ac.id)

**Wahyu Syarvina**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: [wahyusyarvina@uinsu.ac.id](mailto:wahyusyarvina@uinsu.ac.id)

Alamat: Jl. IAIN No.1 Gaharu, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara 20235

**Abstract.** *This research aims to determine the presentation of the Medan City Government budget realization report prepared by the Medan City BPKAD with reference to PSAP number 02 concerning budget realization reports regulated in Government Regulation Number 71 concerning government accounting standards. The types of data used in this research are primary data and secondary data. Data collection techniques were carried out using interview techniques, observation and documentation studies. The data analysis method used is descriptive qualitative with a checklist. This research was conducted at the Regional Financial and Asset Management Agency of Medan City which is located at Jalan Captain Maulana Lubis No. 2 Medan, North Sumatra. The results of this research show that the level of conformity in implementing PSAP No.02 PP No.71 of 2010 reaches 100% using the Dean J.Champion formula. This means that the implementation of the Budget Realization Report within the Medan city government is in accordance with PSAP No.02 PP No. 71 of 2010.*

**Keywords:** *Budget Accounting, APBD, Budget Realization Report, PSAP Number 02 PP Number 71 of 2010, Regional Financial Report.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyajian laporan realisasi anggaran pemerintah kota medan yang disusun BPKAD Kota Medan dengan mengacu pada PSAP nomor 02 tentang laporan realisasi anggaran yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang standar akuntansi pemerintahan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan daftar checklist. Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan yang beralamat di jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 medan, Sumatera Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan PSAP No.02 PP No.71 Tahun 2010 tingkat kesesuaiannya mencapai 100% dengan menggunakan rumus Dean J.Champion. Hal ini berarti penerapan Laporan Realisasi Anggaran di lingkungan pemerintah kota medan sudah sesuai dengan PSAP No.02 PP No. 71 Tahun 2010.

**Kata kunci:** Akuntansi Anggaran, APBD, Laporan Realisasi Anggaran, PSAP Nomor 02 PP Nomor 71 Tahun 2010, Laporan Keuangan Daerah.

## LATAR BELAKANG

Indonesia memiliki manajemen keuangan yang dikenal dengan istilah APBD atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. APBD merupakan perencanaan keuangan per tahun yang akan disetujui oleh DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pada PERDA atau Peraturan Daerah yang mengatur APBD, dimana pada tahun anggaran APBD berlangsung terhitung sejak 1 Januari sampai 31 Desember. Sesuai dengan Peraturan Pemerintahan Nomor.

Kesesuaian PSAP 02 pada Peraturan Pemerintahan Nomor 71 tahun 2010 yang berbasis akrual informasi keuangan diberikan lebih akurat, tetapi penerapannya terlihat sangat sulit dilakukan sehingga belum dapat terciptanya *good governance* dalam kinerja pemerintahan. Maka dari itu terdapat rangkaian jenis laporan keuangan dari 4 jenis menjadi 7 jenis, yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) serta peralihan basis yang awalnya basis kas menjadi basis akrual. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dan memberikan perbedaan dalam mengelola keuangan di pemerintahan dari sebelum masa reformasi dalam pengelolaan keuangan didalam pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor. 71 Tahun 2010 mengatur mengenai Pelaksanaan Anggaran. Laporan Pelaksanaan Anggaran adalah kegiatan analisis dan evaluasi pelaksanaan anggaran (*budget*). Laporan Pelaksanaan Anggaran merupakan pengalokasian anggaran yang telah dilaksanakan dan perlu dilakukan pelaporan dan pertanggungjawaban serta memberikan bukti dalam melakukan kegiatan yang telah dilaksanakan setiap tahunnya. Dari anggaran yang sudah dilaksanakan, dibentuklah laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban harus disesuaikan pada realisasi yang akan ditetapkan sebelumnya dan juga saldo seharusnya bernilai nol (0). Sehingga pelaporan yang berisi informasi mengenai keuangan yang telah terealisasi yang diharapkan sesuai perencanaan. (Suparyanto dan Rosad (2015, 2020)

Menurut teori penganggaran dan teori ekonomi kaynesian, anggaran adalah stimulasi fiskal. Dia menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Sehingga konsep pemerintahannya harus mengganggarkan demi kesejahteraan rakyat. Artinya dalam proses perencanaan, apa yang dianggarkan sudah dihitung dan dipertimbangkan dengan

cermat. Jelas dan terukur. Kalau meleset, artinya ada inefisiensi dalam perencanaan penganggaran. Apa yang disebut sisa yang baik atau penghematan adalah ketika pemerintah bisa belanja tanpa mengurangi output. Tapi, kalau sisa atau selisih itu terlalu banyak, itu juga menunjukkan kurang pas dalam perencanaan saat menentukan standar biaya. Dan kalau masih ada sisa, teorinya lebih baik dioptimalisasi.

Fenomena lain terdapat beberapa kendala yang terjadi seperti pada artikel <https://medanbisnisdaily.com> terdapat artikel yang menyampaikan penerimaan PAD Kota Medan belum dilakukan dengan maksimal dikarenakan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2018 berjalan tanpa ada terobosan-terobosan. Upaya perbaikan manajemen pengelolaan serta optimalisasi pengawasan di lapangan terhadap sumber-sumber penerimaan PAD seperti retribusi parkir di tepi jalan umum, retribusi sampah belum terlaksana sebagaimana diharapkan. Kemudian permasalahan terhadap pelayanan puskesmas di Medan yang masih dinilai buruk. Mengingat banyak diantaranya persoalan aparatur Pemko Medan yang tidak menjalankan fungsinya dengan baik, seperti pelayanan pada Puskesmas yang ada di Medan Johor, Polonia dan Maimun.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk mengadakan studi mengenai implementasi dan presentasi Laporan Realisasi Anggaran Pemerintahan Kota Medan yang disiapkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan sesuai dengan PSAP No 02 yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010. Judul yang diusulkan oleh penulis untuk penelitian ini adalah: “ Analisis Akuntansi Anggaran Belanja Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Kesesuaian Peyajian Laporan Terhadap PSAP 02 ”.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **1. Akuntansi Pemerintahan Daerah**

Bidang ilmu Akuntansi Pemerintahan Daerah fokus pada pencatatan dan pelaporan mengenai pengelolaan keuangan pemerintahan di daerah. Bagian Akuntansi Negara bertanggung jawab dalam menyusun laporan keuangan terkait administrasi Perbendaharaan Negara. Perkembangan Akuntansi Pemerintahan tidak secepat Akuntansi Bisnis, karena terdapat sedikit perubahan. Namun, dengan meningkatnya keinginan masyarakat, Akuntansi Pemerintahan semakin lebih penting. Semakin besar jumlah dana

yang dikelola oleh pemerintah, semakin besar pula kebutuhan akan akuntabilitas keuangan yang transparan dan akuntabel. (Manjana & Nasution, 2022)

## 2. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam khasanah islam sering disebut sebagai Baitul Mal. Baitul Mal adalah pos yang dikhususkan untuk semua pemasukan dan pengeluaran harta yang menjadi hak kaum muslimin/warga negara. Setiap harta yang menjadi hak kaum muslimin, baik diambil dari kaum muslim dan non-muslim menjadi harta baitul mal. Menurut Halim, APBD juga dapat diartikan sebagai perencanaan keuangan setiap tahun oleh pemerintah daerah dan dapat di evaluasi serta juga disepakati oleh pemerintah daerah.

## 3. Laporan Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Dalam peraturan pemerintah No 8 Tahun 2006, tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, menyatakan bahwa laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dan daerah selama satu periode.

## 4. PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran

Pengertian Laporan Realisasi Anggaran dalam pasal 1 ayat 4 adalah laporan yang menggambarkan tentang realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama satu periode. Tujuan standar Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. (Dinda & Dewi, 2022).

## **METODE PENELITIAN**

Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan 2 jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data dikumpulkan dan di peroleh langsung dengan orang-orang yang terlibat di lapangan oleh peneliti disebut data primer. data primer cara memperolehnya dengan melakukan wawancara melalui narasumber yang ahli di bidang sektor keuangan dan properti di kota Medan. Sedangkan Data sekunder ialah jenis data yang secara tidak langsung didapat dari

subjek dengan melakukan wawancara. Data kualitatif dapat mencakup berbagai jenis, termasuk peristiwa atau fenomena yang tidak dapat diukur secara numerik, serta angka atau ukuran. Oleh karena itu, data sekunder terdiri dari fakta-fakta yang dikumpulkan dan disimpan dalam arsip. (Sidiq Umar, Choiri Miftachul, 2019). Dalam penelitian ini, data sekunder meliputi profil dan struktur lembaga keuangan dan properti di kota Medan, serta pelaporan pelaksanaan anggaran kota Medan. Selain itu, informasi tersebut didukung oleh hasil mewawancari dengan Badan Keuangan dan Aset Kota Medan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Penerapan Laporan Pelaksanaan Realisasi Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan**

Berdasarkan hasil analisis pada daftar ceklis dalam laporan realisasi anggaran maka dapat diketahui penerapan Laporan Realisasi Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan sudah diterapkan sangat baik, dimulai dengan menyediakan informasi realisasi pendapatan-LRA yang dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode beserta pos-pos pendapatannya, menyediakan informasi belanja yang dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode beserta pos-pos belanjanya, menyediakan informasi transfer yang dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode beserta pos-pos transfer, menyediakan informasi surplus/defisit-LRA yang dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode beserta pos surplus/defisit LRA dan menyediakan informasi pembiayaan yang dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode beserta pos-pos pembiayaannya.

Meskipun dalam proses penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan masih mengalami beberapa kendala dan masalah dalam proses penyusunan serta pencapaiannya yang disebabkan karena sistem yang sering error, tetapi hal itu tidak mempengaruhi proses penerapan PSAP No. 02 PP Nomor 71 Tahun 2010 di lingkungan pemerintah kota medan.

Berikut adalah hasil yang didapat dari indikator yang digunakan dalam penelitian untuk mengetahui kesesuaian penerapan antara PSAP Nomor 02 dengan LRA Pemerintah Kota Medan yang disusun BPKAD Kota Medan.

### Daftar Ceklis

| No  | Uraian Pertanyaan                                                                                                                                                                                                              | Ya | Tidak |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 1.  | Pencatatatan LRA Pemerintahan Kota Medan memakai azas bruto oleh pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan                                                                                                     | ✓  |       |
| 2.  | Penyusunan LRA Kota Medan sudah memakai basis AkruaI oleh pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan                                                                                                            | ✓  |       |
| 3.  | Informasi LRA periode ini sudah diperbandingkan dengan periode sebelumnya oleh pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan                                                                                       | ✓  |       |
| 4.  | Laporan realisasi anggaran disusun sekurang-kurangnya sekali dalam setahun oleh pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan                                                                                      | ✓  |       |
| 5.  | Pelaporan LRA Pemerintahan Kota Medan sudah dilakukan dengan transparan dan informasi yang disajikan mengenai LRA gampang untuk diketahui masyarakat atau pihak yang berkepentingan                                            | ✓  |       |
| 6.  | Penyusunan LRA Kota Medan sudah efektif, efisien dan juga hemat                                                                                                                                                                | ✓  |       |
| 7.  | Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai anggaran pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan terealisasi yang dibandingkan dengan periode sebelumnya                                      | ✓  |       |
| 8.  | Laporan realisasi anggaran Pemerintahan Kota Medan Mengklasifikasikan pos-pos pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan netto dan juga pembiayaan SiLPA/SiKPA. | ✓  |       |
| 9.  | Pada akhir periode pelaporan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran dipindahkan ke laporan perubahan saldo anggaran lebih                                                                                                       | ✓  |       |
| 10. | Terdapat kendala dalam penyusunan LRA oleh pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan                                                                                                                           | ✓  |       |

Cara perhitungan untuk mendapatkan persentase tingkat kesesuaian dengan menggunakan Rumus Dean J. Champion adalah:

$$\text{Persentase} = \frac{\text{jumlah jawaban "Ya"}}{\text{jumlah pertanyaan}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil dari indikator, maka jawaban "Ya" sebanyak 10 jawaban dan jawaban "Tidak" sebanyak 0 jawaban dari total 10 pertanyaan. Adapun persentase jawaban tersebut yaitu:

$$\begin{aligned} \text{Persentase jawaban "Ya"} &= \frac{10}{10} \times 100\% \\ &= 100\% \\ \text{Persentase jawaban "Tidak"} &= \frac{0}{10} \times 100\% \\ &= 0\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, maka persentase yang diperoleh dari jawaban diatas ialah 100% buat kesesuaian pelaksanaan standar akuntansi pemerintah, penulis menarik kesimpulan kalau pelaksanaan PSAP 02 PP No 71 Tahun 2010 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan telah dinilai sangat baik. Meskipun masih terdapat kendala dalam proses penyusunan dan penyajian laporan realisasi anggaran seperti sistem yang eror.

## **2. Implementasi Laporan Realisasi Anggaran dalam APBD yang disusun BPKAD Kota Medan**

Implementasi dari Laporan Realisasi Anggaran dapat dilihat dari perolehan hasil perhitungan menggunakan teknik analisis dengan daftar checklist yang memakai rumus Dean J. Champion memperoleh nilai sebesar 100%. Hal ini berarti laporan realisasi anggaran pemerintah kota medan yang disusun BPKAD Kota medan sudah sesuai dengan PSAP Nomor 02 PP Nomor 71 tahun 2010. Tingkat kesesuaian ini diperoleh menggunakan 10 indikator penelitian, adapun indikator yang pertama yaitu pencatatan LRA pemerintahan kota medan sudah memakai azas bruto oleh pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan. Dari hasil wawancara dengan pak Dedi Syahputra pada bidang akuntansi.

- a. Jadi indikator pertama ini sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku yakni PSAP Nomor 02. Walaupun pada awalnya bapak itu tidak mengerti apa yang saya tanyakan sehingga agak sedikit marah tetapi akhirnya si bapak mengerti dengan pertanyaan saya kalau memang di kota medan itu laporan realisasi anggarannya sudah memakai azas bruto.
- b. Jadi indikator kedua juga sudah sesuai dengan PSAP 02. Walaupun bapak itu awalnya menjawab tidak tetapi setelah bapak itu baca dalam PSAP 02 bapak itu menyimpulkan bahwa sudah memakai basis akrual.
- c. Jadi indikator ketiga ini selain diambil data ke kantor BPKAD hasil realisasi anggaran juga bisa diakses di website resmi pemko medan. Dan di web itu tidak hanya ada laporan realisasi anggaran tetapi banyak juga kegiatan-kegiatan yang di posting di web artinya itu memudahkan kita dalam melihat kinerja pemerintahan kota medan
- d. Jadi indikator ke empat ini penyusunan LRA sudah setiap tahun di susun dan diakumulasikan. Ini juga setiap tahun dilakukan karena kalau tidak darimana akan dibandingkan dengan periode sebelumnya jadi memang KBPKAD kota medan sudah mengikuti apa-apa saja yang memang harus diterapkan hanya saja memang ada beberapa yang belum memadai seperti kendala sistem yang eror
- e. Jadi indikator kelima penyusunan secara transparan itu harus dilakukan untuk saling terbuka dan percaya dalam hal penganggaran. Anggaran adalah hal yang sensitif apalagi menyangkut dana umat yang harus tersalurkan jadi memang harus transparan dalam hal apapun sehingga rakyat masih percaya dengan pemerintah kota medan
- f. Jadi indikator ke enam ini anggaran yang dibuat sudah cukup efektif dan efisien. Ini harus dilakukan setiap anggaran yang direncanakan maka realisasinya itu harus efektif, efisien dan juga hemat jadi semua dikerjakan dengan baik apalagi sekarang zaman digital yang serba mudah mendapatkan informasi.
- g. Jadi indikator ke tujuh ini sudah mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 dan sudah diterapkan prosedurnya pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan. Penyusunan LRA ini memang harus disesuaikan dengan PSAP 02 apalagi kalau PSAP 02 nya update ke yang terbaru harus diikuti juga jadi memang harus orang yang berkompeten juga dalam hal membuat LRA.



- h. Jadi pada indikator kedelapan ini sudah diterapkan. Dan sudah pastilah karena ini kan hal pokok dalam membuat LRA jadi memang ini yang harus benar benar dilakukan dengan baik dan sebisa mungkin tidak mengalami kesalahan dan pilihlah SDM yang berkompeten dan jujur.
- i. Jadi pada indikator kesembilan ini sudah diterapkan dengan baik. Ini juga hal yang selalu di terapkan dengan baik kalau tidak bisa bermasalah kemudian hari dikarenakan memang pos pos ini lah yang harus diperhatikan.
- j. Jadi indikator kesepuluh ini terdapat kendala-kendala kecil kendala nya masih bisa teratasi oleh BPKAD. Seperti eror SDM yang kurang mengerti itu masih bisa dikendalikan tetapi kalau SDM yang sudah tak jujur itu kendala terbesarnya karena 1 yang mengambil bisa jadi semua kena getahnya dikarenakan masalah keuangan itu sangat sensitif untuk dihadapi.

### **3. Penyusunan APBD yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan**

Anggaran merupakan rencana yang di susun secara sistematis yang meliputi kegiatan operasional yang dinyatakan dalam unit moneter dan berlaku untuk jangka waktu dimasa mendatang. Prosedur adalah serangkaian kegiatan administrasi yang biasanya melibatkan beberapa orang, untuk mencapai keseragaman tindakan dalam melakukan kegiatan rutin. Melalui prosedur data dapat terkumpul dan disampaikan kepada yang memerlukannya. Penyusunan adalah merupakan suatu kegiatan atau kegiatan memproses suatu data atau kumpulan data yang dilakukan oleh suatu organisasi atau perorangan secara baik dan teratur Penyusunan anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan Kantor diharapkan berdasarkan data yang telah melalui prosedur yang tepat. Hal ini diketahui karena anggaran yang disusun oleh pihak-pihak yang berkompeten dalam bidangnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dedi Syahputra tersebut, penulis menyimpulkan bahwa proses penyusunan LRA Kota Medan sudah baik, dimulai dari penyusunan LRA di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di kota medan kemudian dikumpulkan di BPKAD Kota Medan untuk disusun menjadi LRA Kota Medan. Pihak yang terlibat dalam penyusun LRA juga orang-orang yang berkompeten dalam bidang perbendaharaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. Sedangkan di BPKAD melibatkan bidang akuntansi dan bidang perbendaharaan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Dari Hasil penelitian ini, serta diskusi tentang penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran di bab sebelumnya, menghasilkan kesimpulan berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran BPKAD Kota Medan telah menyesuaikan dengan PSAP Nomor 02 dan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada. Laporan yang disajikan melalui elemen-elemen realisasi anggaran, dimulai dengan azas bruto, basis akrual, informasi teralisasi, dan perbandingan dengan periode sebelumnya. Setiap pos dikemas dengan baik dan mudah dipahami. Terlepas dari itu, proses penyampaian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan terus mendapatkan sejumlah masalah dan hambatan, termasuk sistem yang sering bermasalah.
2. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran, tercantum dalam PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual, telah diterapkan oleh BPKAD Kota Medan.
3. Penyusunan APBD yang dikelola oleh BPKAD sudah baik, proses penyusunan LRA Kota Medan sudah baik, dimulai dari setiap LRA di masing-masing SKPD di Kota Medan selanjutnya dikumpulkan di BPKAD Kota Medan lalu tersusun menjadi LRA Kota Medan. Pihak sebagai penyusun LRA juga orang yang paham dalam bidang perbendaharaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. Sedangkan di BPKAD melibatkan bidang akuntansi dan bidang perbendaharaan.

### **Saran**

1. BPKAD Kota Medan diharapkan untuk mematuhi perubahan dalam peraturan dalam menyajikan laporan keuangan, terutama ketentuan PSAP Nomor 02 yang telah di atur dalam PP Nomor 71 tahun 2010. Ini dilakukan agar laporan yang disusun dapat bermanfaat bagi semua orang yang menggunakan laporan.
2. Sebaiknya SDM yang terlibat dalam pekerjaan yang membantu penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) harus sering mengikuti Bimbingan Teknis (BIMTEK) yang harus diupdate dan diterapkan di seluruh SKPD di Indonesia. Ini dilakukan untuk mengurangi jumlah alat yang digunakan dalam

penyusunan LRA dan memungkinkan alat lain untuk bekerja sesuai dengan tupoksi awalnya.

3. Sebaiknya bagi peneliti selanjutnya sebaiknya ditambah lagi objek apa yang akan diteliti dan variabel penelitian serta pembahasannya diperluas secara lebih detail termasuk dalam tahapan penyusunan, pengendalian dan juga pengawasan untuk menghasilkan penelitian yang terbaru
4. Sebaiknya bagi akademisi lebih dibimbing dan diawasi lagi agar penulisan skripsi lebih cepat dan dikarenakan pada kondisi semester akhir ini banyak yang sudah tidak fokus dalam mengerjakan skripsi pasti ada saja kerjaan yang menghambat seperti kebanyakan organisasi atau mencari biaya diparuh waktu yang membuat tujuan awalnya menjadi goyah

## DAFTAR REFERENSI

- Suparyanto dan Rosad (2015). (2020). LITERATURE REVIEW : REALISASI ANGGARAN DAN RENCANA KERJA ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) DI SMPIT AL-IZZAH KOTA SERANG. *Suparyanto Dan Rosad (2015, 5(3), 248–253.*
- Harmain, H., Daulay, A. N., & Enre, D. T. (2020). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam ANALYSIS OF VALUE FOR MONEY INCOME BUDGETS Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. 4(2).*
- Dinda, K., & Dewi, P. (2022). *Analisis Laporan Ikhtisar Realisasi Anggaran Untuk Menilai Pencapaian Kinerja Keuangan Pada Kantor Pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara.*
- Fauzi, A., Nisa, B., Napitupulu, D., Abdillah, F., Utama, A. A. G. S., Zonyfar, C., Nuraini, R., Purnia, D. S., Setyawati, I., Evi, T., Permana, S. D. H., & Sumartiningsih, M. S. (2022). Metodologi Penelitian. In *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* (Vol. 3, Issue April).
- Manjana, A., & Nasution, J. (2022). *Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Sesuai PP No 71 tahun 2010 Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar. 3(1), 57–62.*
- BPK. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).*
- Sidiq Umar, Choiri Miftachul, (2019). Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- Lompang, M. R. D., Sabijono, H., Wokas, H. R. N., Ekonomi, F., Akuntansi, J., Ratulangi, U. S., & Bahu, K. (2022). *Evaluasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran ( Studi Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Manado ) Evaluation of the Statement of Government Accounting Standards Number 02 on the Report on B. 6(1), 5–7.*
- Madjid, J. (2019), Akuntansi Sektor Publik. In *Yogyakarta. (Issue 25).*